

Kajian penerapan kriteria penyediaan Sekolah Dasar di Kecamatan Kelapa Gading

Indah Susilowati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=108795&lokasi=lokal>

Abstrak

Pengembangan perumahan tidak akan terlepas dari pengembangan fasilitas yang akan memenuhi tiga kebutuhan pokok konsumen perumahan yaitu tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tempat ibadah dan sekolah. Bagi konsumen perumahan, terutama keluarga muda atau keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar, pemilihan lokasi perumahan akan mempertimbangkan keberadaan sekolah dasar di lingkungan perumahan dan sekitarnya. Kondisi ini terjadi karena kemampuan jangkauan anak usia sekolah dasar masih relatif rendah atau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu sekolah dasar yang baik diharapkan berada dalam lingkungan perumahan, apalagi lingkungan perumahan tersebut sengaja direncanakan oleh pengembang Di Kecamatan Kelapa Gading saat ini berkembang 37 sekolah dasar yaitu 17 sekolah dasar negeri (SDN) dan 20 sekolah dasar swasta (SDS), yang jika ditinjau lebih dalam terdapat beberapa perbedaan antara SDN dan SDS yaitu perbedaan distribusi lokasi, daya tampung siswa, jenjang akreditasi dan biaya pendidikan. Perbedaan antara SDN dan SDS yang disebutkan di atas, menyebabkan persaingan antar sekolah yang akan menambah perbedaan atau variasi antar sekolah dan akan mengurangi kesamaan akses terhadap pendidikan. Di sisi lain perkembangan SDS menimbulkan beberapa penyimpangan penggunaan lahan karena pemilihan lokasi SDS yang mempertimbangkan pasar sehingga perlu memperluas jangkauan pelayanan. Konsekuensinya lokasi yang dipilih seringkali tidak sesuai dengan kriteria lokasi SD. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan penelitian yang perlu dijawab yaitu 'Bagaimana penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?', 'Apakah penyediaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (efektif)?', dan 'Bagaimana penerapan kriteria penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?'.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan dilakukan beberapa analisis dengan beberapa metode yaitu analisis deskriptif, perbandingan, non parametrik, faktor dan keruangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah penyediaan SD 1) selaras dengan perkembangan perumahan walaupun menimbulkan kesenjangan antar SD dan penyimpangan penggunaan lahan, 2) melibatkan multistakeholder, 3) terutama SDS, didorong oleh permintaan masyarakat yang cukup tinggi terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, penawaran pelayanan pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan pemerintah serta dukungan pemerintah bagi swasta untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, 4) efektif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 5) didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup perhitungan kebutuhan SD dan lingkup pelayanan SD, 6) tidak didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup alokasi lahan dan distribusi lokasi, 7) terkait dengan distribusi lokasi SD, dipengaruhi oleh perkembangan perumahan, status sekolah dasar, kualitas sekolah dan penggabungan SD dengan jenjang sekolah lainnya. Kesimpulan ini diduga tidak hanya berlaku di Kecamatan Kelapa Gading, tetapi berlaku juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Adapun rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah harus menerapkan integrated and multi-stakeholders approach dalam penyediaan SD di Kecamatan Kelapa Gading (dan kasus lain yang serupa, mengkaji kembali kriteria penyediaan SD, membentuk format dan program kemitraan, dan membenarkan legal administratif penggunaan lahan dan perijinan pembangunan; pengembang harus merencanakan fasilitas perumahan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat sejak awal pengembangan perumahan dan sebagai bagian dari perencanaan pengembangan perumahan dengan mempertimbangkan rencana kota secara keseluruhan; yayasan pendidikan dan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dalam pemilihan lokasi, dari faktor lokasi, perkembangan perumahan, status dan kualitas sekolah, penggabungan sekolah dan rencana kota secara keseluruhan; melakukan beberapa kajian lanjutan karena adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, mengenai kesenjangan SDN dan SDS, keterlibatan multi-stakeholder dalam penyediaan terkait dengan format dan program kemitraan antar stakeholder, penerapan kriteria penyediaan SD dengan kasus lain dan integrasi perencanaan fasilitas dengan perencanaan kota.

<hr>

Facilities development in a housing development is inevitable and shall be able to provide three basic needs of housing consumer they are shopping places for common goods, worships places and schools. Housing consumer, typically young couples or a family with primary school-age children would consider chosen a housing complex by considering the presence of primary school in the neighborhood. This consideration was based on the limited mobility of primary school-age children to go to school. In this case, parents expecting that there will be good primary school in their neighborhood, especially when the neighborhood was planned/ designed by the housing developer, In Kecamatan Kelapa Gading currently established 37 primary schools consisting of 17 public schools (Sekolah Dasar Negeri - SDN) and 20 private schools (Sekolah Dasar Swasta -- SDS). Based on further review it was found out that there are few differences between them, such as location distribution, school capacity, accreditation level and tuition fee. These differences create higher school competition that will lead to school variation and decreasing equal access to education. In the other side the development of private primary school introduced few discrepancies in the land use implementation, since the private school's location is mainly selected based on market demands and the need to increase service area. As consequences of this selection, the chosen location usually not complies with the primary school location criteria.

Above facts triggered research questions, that will be answered in this research such as "How is the provision of primary school in Kecamatan Kelapa Gading?", 'Did the primary school provision meet the consumer needs (effective)?', and 'How does the implementation of primary school provision criteria in Kecamatan Kelapa Gading?'.

To answer above questions there are few analysis will be conducted by utilizing various analysis methods such as descriptive analysis, comparative analysis, non-parametric analysis, factorial analysis and spatial analysis. The conclusions of those analysis are 1) the provision of primary school is aligned with housing development even it's caused gap among primary schools and discrepancies in the land use, 2) the provision of primary school involves multistakeholders, 3) the provision of primary school, especially private primary school, is influenced by demand of consumer whose high social economic level, inadequate education service supply, limitations of government and supports from government for private sector to be involved in education service production 1 provision, 4) the provision of primary school met the consumer needs, 5) the

provision of primary school is based on implementation of primary school provision criteria including calculation of primary school need and primary school service area, 6) the provision of primary school isn't based on implementation of primary school provision criteria including land classification and distribution of location, 7) the provision of primary school, especially primary school location distribution, influenced by housing development, school status, school quality and combination of primary school with other school level in one location. These conclusions are assumed to be applicable not merely in Kecamatan Kelapa Gading, but in other area that have similiar condition with Kecamatan Kelapa Gading.

Recommendations from this study are government must implement integrated and multi-stakeholders approach in primary school provision especially in Kecamatan Kelapa Gading (and other similar area), review the primary school provision criteria, create partnership format and program, and improve legal administrative approach in land use and building permit sector; ensure that developer must plan housing facilities as part of housing development plan with consideration to the entire of urban plan; education institution and government must consider some factors in location selection (location factors, housing development trend, status and quality school, and urban plan); conduct various further study, due to limitation of this study, related to the gap between private - public primary school, multi-stakeholders involvement in primary school provision in regards to the partnership format and program among stakeholders, the implementation of primary school provision criteria in another case and the integration of facilities planning into urban planning.